

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir, perkembangan ekonomi syariah secara global terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu bisa dilihat karena mulai banyaknya negara-negara yang menggunakan sistem ekonomi syariah.¹ Salah satu pengguna ekonomi syariah adalah Indonesia. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak terlepas dari beberapa faktor. Faktor perkembangan ekonomi syariah terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor eksternal dan internal. Untuk faktor eksternal nya adalah karena penyebab yang datang dari luar negeri, berupa perkembangan ekonomi syariah di negara-negara lain, baik yang berpenduduk mayoritas Muslim maupun non Muslim. Negara-negara tersebut telah mengembangkan ekonomi syariah setelah timbulnya kesadaran tentang perlunya identitas baru dalam perekonomian mereka. Sedangkan untuk faktor internalnya adalah karena kenyataan bahwa Indonesia ditakdirkan menjadi negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Fakta ini menimbulkan kesadaran di sebagian cendekiawan dan praktisi ekonomi tentang perlunya suatu ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dijalankan oleh masyarakat Muslim di Indonesia.²

¹ Irfan, *Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia*, dalam <https://irfan.id/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia/>, diakses pada hari kamis, 28 maret 2019, 21.13 WIB

² Mahfuz, S.Sos.I., M.Si, *Perkembangan Ekonomi Syariah dan Peran Sertanya dalam Pembangunan Indonesia*, <http://www.globalmulia.ac.id/berita-perkembangan-ekonomi-syariah-dan-peran-sertanya-dalam-pembangunan-indonesia.html>, diakses pada hari kamis, 28 maret 2019, 21.13 WIB

Didalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak luput juga dengan adanya sengketa atau perselisihan, hal itu tidak dapat terpisahkan karena penyebab sengketa ekonomi syariah di Indonesia sangat beragam, salah satu penyebab sengketa ekonomi syariah karena salah satu pihak tidak melakukan prestasinya atau yang disebut Wanprestasi, ataupun terjadi karena para pihak tidak faham mengenai prinsip-prinsip hukum yang mengaturnya maupun permasalahan dalam penafsiran isi perjanjian (akad). Walaupun para pihak telah membuat suatu perjanjian salah satunya agar perjanjian tersebut dapat dilaksanakan maupun ditaati oleh para pihak, namun sengketa tetap saja tidak bisa dihindarkan karena kondisi tertentu. Untuk pengertian secara umumnya sengketa ekonomi syariah adalah pertentangan antara dua belah pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya dilaksanakan karena prinsip-prinsip serta asas hukum ekonomi syariah yang penyebabnya karena perbedaan persepsi tentang kepentingan atau hak milik yang ditimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak dan diberikan sanksi atau hukuman terhadap salah satu pihak.³ Oleh karena itu kewenangan untuk menyelesaikan ekonomi syariah diberikan kepada pengadilan agama, dimana pengadilan harus bisa menjawab semua persoalan dengan berbagai pertimbangan hukum dan para penegak hukum di pengadilan agama harus mengacu kepada peraturan-peraturan dan undang-undang yang masih berlaku di Indonesia.

Tugas utama dari Pengadilan Agama adalah sebagai Badan pelaksana Kekuasaan Kehakiman ialah dengan menerima, memeriksa dan mengadili serta

³ Amran Saudi, 2017, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariat, Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta, h.11

menyelesaikan setiap perkara. Produk hukum yang dihasilkan dari pemeriksaan perkara di persidangan ada tiga macam yang pertama putusan, kedua penetapan, dan yang ketiga akta perdamaian. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah seharusnya diselesaikan dengan perdamaian hal itupun sudah jelas dan dilihat didalam Al Quran disitu sangat jelas Allah SWT, menyebutkan perintah bagi orang-orang yang beriman harus mendamaikan sesama Muslim :

“ Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Qs Al Hujarat ayat 9)⁴

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama yang didasarkan pada Penjelasan point (1) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini Pengadilan agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikannya.⁵

Didalam pengadilan sendiri biasanya para hakim berupaya untuk melaukkn perdamaian, biasanya ditempuh melalui musyawarah dan untuk

⁴ Qs Al Hujarat ayat 9

⁵ Muh Nasikhin, 2010, Perbankan Syariah Dan Sistem Penyelesaian Sengketanya (Kuala Tunggal: Fatawa), hal 141

mencapai kata damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Perdamaian harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah agar sengketa atau permasalahan tersebut cepat bisa diselesaikan. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama hal ini telah diadopsi menjadi asas bagi seluruh hakim yang menyelesaikan perkara yang ditunjukan untuknya. Upaya perdamaian sendiri diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. Untuk menyelesaikan perkara atau perselisihan dengan damai dalam hal keperdataan, tidak hanya dapat ditempuh atas kemauan oleh para pihak tetapi bisa dengan keterlibatan Mediator. Hal itu ditempuh apabila tidak mencapai kata damai, maka persidangan dilanjutkan sesuai dengan ketetapan di pengadilan agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui proses litigasi?
2. Adakah hambatan yang muncul dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui proses litigasi?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan penelitian yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui proses litigasi.
- c. Untuk mengetahui hambatan yang muncul dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui proses litigasi.

2. Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan perkembangan Ilmu Hukum dan sebagai referensi untuk kalangan akademisi yang akan melakukan penelitian sejenis yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui proses litigasi.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini bertujuan sebagai sarana pengetahuan umum tentang penyelesaian sengketa ekonomi melalui proses litigasi.

D. Kerangka Pemikiran

Di dalam terminologi Islam dikenal dengan *ash-shulhu*, yang berarti memutus pertengkaran atau perselisihan. Dalam pengertian syari'at *ash-shulhu* adalah suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (sengketa) antara 2 (dua) orang yang bersengketa.⁶ Alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur di satu pasal, yakni mengenai tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa yang menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian sengketa⁷. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 memberikan dua kemungkinan penanganan perkara ekonomi syariah yaitu dengan cara sederhana atau dengan cara biasa. Penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara sederhana mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atas perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 atau biasa dikenal dengan istilah *small claims court*. Sementara itu, penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara biasa tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana dimulai dengan pengajuan gugatan ke pengadilan dan harus melewati mekanisme persidangan sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun ketentuan-ketentuan penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara sederhana, diantaranya : Nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500 juta, para pihak berdomisili di wilayah hukum yang sama, penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, alamat tergugat harus diketahui, pendaftaran perkara menggunakan blanko gugatan; pengajuan bukti-bukti harus bersamaan dengan

⁶ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Terjemahan Jilid 13), (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), hlm. 189.

⁷ Pasal 6 Undang- Undang No. 30 Tahun 1999

pendaftaran perkara, penunjukan hakim dan panitera sidang paling lama 2 hari, hakim tunggal, adanya pemeriksaan pendahuluan, tidak ada mediasi; penggugat dan tergugat wajib hadir tanpa didampingi kuasa hukum, gugatan dinyatakan gugur apabila penggugat pada sidang pertama tidak hadir tanpa alasan yang sah; dalam proses pemeriksaan hanya ada gugatan dan jawaban; waktu penyelesaian perkara 25 hari sejak sidang pertama; penyampaian putusan paling lambat 2 hari setelah putusan diucapkan, tidak ada upaya banding maupun kasasi, yang ada upaya hukum pegajuan keberatan yang diajukan 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau langkah yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Pendekatan masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁸

2. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil dan dikumpulkan. Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah :

⁸ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: UMM Press, hlm. 57.

- a. Data primer yaitu data yang diambil langsung dari sumbernya. Dalam hal ini berupa informasi langsung dari pihak Pengadilan Agama, berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui proses litigasi.
- b. Data sekunder, dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer sehingga data ini diperoleh secara tidak langsung dalam penelitian ini. Data ini bersumber dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dari suatu penelitian yang terdiri dari :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah dengan melihat kepada bahan-bahan yang didokumentasikan. Dari studi kepustakaan ini akan diperoleh manfaat berupa konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian melalui prosedur logika deduktif, akan dapat ditarik kesimpulan spesifik yang mengarah pada penyusunan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitiannya dan akan diperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁹ Studi kepustakaan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, meliputi:

⁹ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada)

- 1) Bahan-bahan Hukum Primer seperti. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 6 Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana.
- 2) Bahan-bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana, buku-buku literatur yang berkaitan, dan hasil-hasil penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada sang narasumber. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor itu ialah pewawancara, narasumber, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Pewawancara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber untuk menjawab, menggali jawaban lebih dalam dan mencatat jawaban dari narasumber.

c. Analisis Data

Analisis bahan hukum dalam skripsi ini dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu peneliti mencari pemahaman atau pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan/atau tidak langsung yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh. Penelitian ini mengumpulkan data secara bertahap dan makna disimpulkan selama proses berlangsung dari awal hingga akhir penelitian, bersifat naratif.¹⁰

F. Sistematika Skripsi

Agar lebih mudah dalam memahami dan mempelajari hasil penelitian dan pembahasannya yang tertuang dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi ini dibagi dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat, permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka pada bab ini berisi tentang uraian yang meliputi pengertian tentang Pengadilan Agama, ekonomi syariah, sengketa ekonomi syariah, pengertian sengketa ekonomi syariah dalam gugatan sederhana dan dalam gugatan biasa.

¹⁰ A Muri Yusuf. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. Hal. 328

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini di dalamnya meliputi hasil dari temuan di lapangan kemudian proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, efektifitas gugatan sederhana, Analisis tentang beberapa kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Karanganyar dan cara penyelesaiannya.

BAB IV Penutup pada bab ini merupakan bab penutup, berisi kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.